PROSIDING Bahasa & Sastra Indonesia

Konservasi dan Pendidikan Karakter

Editor:
Dr. Subyantoro, M.Hum.
Ahmad Syaifudin, S.S., M.Pd.
Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum.
Suseno, S.Pd., M.A.
Wati Istanti, S.Pd., M.Pd.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2011

PENGAJARAN BAHASA

PENGEMBANGAN PAKET BUKU PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERBASIS KESANTUNAN BERBAHASA LINTAS BUDAYA JAWA TENGAH: UPAYA MEMBANGUN NILAI-NILAI KARAKTER BAGI GENERASI BANGSA 513
oleh Dr. Subyantoro, M.Hum.

PERENCANAAN BAHASA SEBAGAI PENGUATAN KONSERVASI BAHASA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 521
Ahmad Syaifudin

KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN BUKU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN BUKU SANTUN BERBAHASA INDONESIA MELALUI MODEL ANALISIS, SELEKSI, ORGANISASI, INTEGRASI (ASOI) UNTUK MENINGKATKAN KESANTUNAN BERBAHASA PESERTA DIDIK DI SMP 527
Amintaningsih

PENGEMBANGAN PENILAIAN PEMBELAJARAN MENDENGARKAN DALAM MENUMBUHKAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBAHASA 539
*Arono**

ARTIKEL PERBEDAAN KESANTUNAN BERBICARA DAN MENULIS SISWA KELAS XI SMA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA YANG MENGGUNAKAN BUKU AJAR SANTUN BERBAHASA INDONESIA DAN BUKU AJAR BAHASA INDONESIA DENGAN MODEL INVESTIGASI KELOMPOK 555
Aunur Rofiq

DIDACTIC FUCTION OF NATIONAL CHARACTER BIOGRAPHY IN INDONEASIAN LANGUAGE AND LITERATURE LEARNING IN CULTURE EDUCATION AND NATION CHARACTER BASIS 571
Dedi Wijayanti

FUNGSI DIDAKTIS BIOGRAFI TOKOH NASIONAL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA BERBASIS PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA 572
Dedi Wijayanti

NILAI-NILAI KESANTUNAN BERBICARA DALAM AL-QURAN SEBAGAI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PELAJAR DI SEKOLAH (SEBUAH TINJAUAN RELIGIOPRAGMATIK) 577
Fahrudin Eko Hardiyanto

EKSISTENSI BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL (SBI) 583
Fatmah AR. Umar

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KONTEKS MULTIKULTUR DAN PENDIDIKAN KARAKTER 593
Ida Zulaeha

MENCARI ALTERNATIF MODEL PEMBELAJARAN MENULIS MENUJU PENGEMBANGAN BUDAYA BACA TULIS 601
Kastam Syamsi

EKSISTENSI BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL (SBI)

Oleh

Fatmah AR. Umar

Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak: *Salah satu wadah yang dapat dijadikan sarana pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah melalui pembelajaran di sekolah. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah didasarkan pada beberapa landasan yuridis, antara lain Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, UUD 1945 pasal 36, UURI Nomor 24 Tahun 2009 bab III bagian kesatu pasal 25 ayat 3 dan bab III bagian keua pasal 29 ayat 1 Undang-Undang sistem pendidikan Nasional (SISDIKNAS) BAB VII, Psl 33 ayat 1. Dari landasan yuridis tersebut ditekankan bahwa (1) bangsa Indonesia berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia, (2) bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam setiap tingkatan pendidikan nasional, (3) bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media. Sebagai implementasi dari landasan yuridis tersebut, pemerintah menetapkan kurikulum Nasional dan Garis-Garis Besar Prorgram Pengajaran Bahasa Indonesia untuk setiap tingkatan sekolah yang ada di Indonesia. Di samping itu sejak tahun 2002 BI ditetapkan sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa Di PT dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian.*

Akan tetapi, kenyataan menunjukan bahwa beberapa sekolah yang ada di Indonesia berlomba-lomba menjadi sekolah berstandar internasional (SBI) yang bercirikan bahasa pengantar adalah bahasa asing (Inggris). Apakah indikator mutu sekolah berstandar internasional hanya diukur dari keunggulan berbahasa asing (Inggeris) pengajarnya dan lulusannya? Bukankah hakikat dan tujuan sekolah berstandar internasional agar mutu lulusannya setaraf dan dapat bersaing secara internasional? Bukankah bahasa Indonesia merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia? Bukankah bahasa Indonesia telah menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib hampir di tiga puluh empat (34)? Dan bukankah bahasa Indonesia telah menduduki urutan ke-4 bahasa dunia?

Permasalahan atau pertanyaan ini perlu dipikirkan secara arif dan bijaksana oleh kita semua (bangsa Indonesia) sejak dini. Jika tidak lambat laun secara tidak langsung dan pasti kita akan (1) terjebak kepada lubang yang kita gali sendiri, (2) mendiskriminasi hakekat dan tujuan pendidikan, (3) menghancurkan kepribadian anak bangsa, (5) menghianati pejuang bangsa, dan (6) menghilangkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Kata-kata kunci: eksistensi, bahasa Indonesia, dan sekolah berstandar internasional (SBI)

THE EXISTENCE OF INDONESIAN LANGUAGE IN *SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL* (*SBI* / INTERNATIONAL-STANDARD SCHOOL)

By
Fatmah AR. Umar
Study Program of Education of Indonesian Language and Letters
Faculty of Letters and Culture
Gorontalo State University

Abstract: *One of the umbrellas that can be used as a means of fostering and development of Indonesian language is through learning in school. Learning Indonesian language in schools is based on a juridical basis, including the Youth Pledge of October 28, 1928, Indonesia Constitution of 1945 article 36, Indonesian Government Act No. 24 of 2009 in Chapter III part I article 25 verse 3 and chapter III part II article 29 verse 1, National Education System Act Chapter VII article 33 verse 1. It is emphasized that, (1) Nation of Indonesia has only one language, which is the Indonesian language, (2) Indonesian language as the instruction in all levels of national education, (3) the Indonesian language as the official state language is served as a tool of instruction in education, national communication, in transactions and documentation of commercial, as well as development and utilization facilities of science, technology, art, and media language. As the implementation of the juridical basis, the government set a national curriculum and outlines of Indonesian Language Teaching Prorgram for all levels of education in Indonesia. In addition, since 2002, Indonesian language was designated as a compulsory subject for every student in university in the group of personality development subjects.*

*However, the fact shows that some schools in Indonesia are trying to become an International-Standard School (*SBI*) which is characterized by the foreign language as instruction language (English). Are the indicators of international standard school measured only by the foreign language (English) spoken by the teachers and alumni? Are the nature and purpose of an international standard for quality of school graduates equal and internationally competitive? Isn't it stated that Indonesian language is the national identity? Isn't it a general fact that Indonesian language has been a compulsory subject in almost thirty-four countries and become the fourth mostly used language in the world?*

Problems or questions should be considered wisely by all of us (Indonesian people) early on. Otherwise, gradually, indirectly, and for sure we will (1) stuck to the hole that we dug itself, (2) discriminate against the nature and purpose of education, (3) destroy the childrens' personality, (4) betray the national heroes, and (5) eliminate the national identity of Indonesia.

Key words: existence, Indonesian language, International-Standard School (SBI)

I. PENDAHULUAN

Eksistensi (kedudukan dan fungsi) bahasa Indobesia dalam berbagai sendi kehidupan manusia sangatlah penting. Salah satu di antaranya adalah dalam pembentukan karakter atau kepribadian anak bangsa Indonesia. Eksistensi (kedudukan dan fungsi) dimaksud telah ditetapkan di dalam UU No 20 Tahun 2003, dan PP No 19 Tahun 2005. Di dalam kedua landasan yuridis tersebut ditetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam setiap tingkatan pendidikan nasional. Hal itu tercantum dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, BAB VII, Psl 33 ayat 1 yang berbunyi "Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional". Sebagai implementasi dari UU SISDIKNAS tersebut, pemerintah menetapkan kurikulum Nasional dan Garis-Garis Besar Prorgram Pengajaran Bahasa Indonesia untuk setiap tingkatan pendidikan yang ada di Indonesia.

Khusus di PT (di kalangan mahasiswa) mata kuliah bahasa Indonesia memiliki visi, misi, dan tujuannya. Visi mata kuliah bahasa Indonesia adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana pengembang kepribadian insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan santun (Widjono Hs 2007:5), sedangkan Rahayu (2007:4) mengatakan bahwa visi mata kuliah bahasa

Indonesia adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu instrumen pengembang kepribadian mahasiswa menuju terbetuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya, misi mata kuliah bahasa Indonesia menurut Rahayu (2007:4) adalah tercapainya kemahiran mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang berkepribadian. Di samping itu misi mata kuliah bahasa Indonesia adalah (1) membina mahasiswa bangga berbahasa Indonesia dalam forum dan bertanggung jawab untuk memeliharanya dengan sungguh-sungguh, (2) memotivasi mahasiswa merefleksikan nilai-nilai budaya melalui bahasa persatuannya dalam kehidupan sehari-hari, (3) membina pembelajaran bahasa Indonesia di PT semakin berkualitas sesuai dengan tuntutan global, (4) mengupayakan kemahiran berbahasa Indonesia melalui pembelajaran yang berkualitas dalam menggunakan bahasa Indonesia dan mengaplikasikannya bagi pengembangan ilmu dan teknologi, seni, dan budaya dengan rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Visi dan misi tersebut di atas, mengindikasikan bahwa mata kuliah bahasa Indonesia merupakan pengejewantahan dan sekaligus implementasi nilai-nilai budaya.

Di samping itu Mendiknas, Bambang Sudibyo (dalam Nurjamal dan Sumirat 2010:209), mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya digunakan dan dipelajari di tanah air, tetapi juga telah tersebar dan telah dipelajari di berbagai perguruan tinggi mancanegara. Butkti menunjukkan bahwa bahasa Indonesia di samping dipelajari oleh penutur asing yang ada di Indonesia yang dikenal dengan BIPA, juga telah menjadi salah satu mata kuliah wajib di beberapa negara, antara lain Australia. Dalam hal ini bahasa Indonesia telah menjadi mata kuliah yang diminati. Masalahnya adalah bagaimana dengan kita bangsa Indonesia sebagai pemilik bahasa ini?.

Untuk melihat sejauh mana realisasi kecintaan, kesetiaan, dan kebanggaan bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia, maka pihak-pihak yang terkait (terutama yang bergerak dalam bidang pendidikan) telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/MA/SMK dan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian di PT yang wajib dicantumkan dalam kurikulum pada seluruh Jurusan/Prodi/Fakultas dan wajib diambil/diprogramkan oleh seluruh mahasiswa sampai lulus. Selanjutnya, bahasa Indonesia ditetapkan pula sebagai mata pelajaran/mata kuliah yang diujikan secara nasional (UAN/UN).

Akan tetapi, sungguh ironis apabila bangsa lain sedang gencar-genacarnya memelajari bahasa Indonesia, tetapi kita bangsa Indonesia memunculkan sensasi negatif terhadap eksistensi (kedudukan dan fungsi) bahasa Indonesia. Sensasi negatif yang dimaksud antara lain menjadikan beberapa sekolah yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah menjadi sekolah berstandar internasional (SBI) dengan ciri khasnya memarjinalkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan menggantikannya dengan bahasa asing (bahasa Inggris). Guru yang mengajar dan siswa yang belajar di sekolah tersebut dipaksa menanggalkan identitasnya (bahasa Indonesia) dan harus berbahasa Inggris. Apakah seperti inilah hakikat dari SBI? Kebijakan ini tentunya sungguh sangat bertentangan dengan isi Sumpah Pemuda, UUD 1945, UU RI Nomor 24 Tahun 2009, UU Sistem Pendidikan Nasional.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalah berikut.

1) Mengapa pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam bidang sekolah berstandar internasional (SBI) memarjinalkan penggunaan bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa asing (Inggris) menjadi bahasa pengantar di sekolah?
2) Bahasa Indonesia adalah identitas jati diri bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan dengan tetesan keringat, air mata, dan darah oleh para pejuang, tetapi mengapa di SBI bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai bahasa pengantar?
3) Bahasa Indonesia telah berada di urutan ke-4 sebagai bahasa dunia dan telah menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib di tiga puluh empat (34) negara, tetapi mengapa bangsa Indonesia sendiri sebagai pemiliknya justru menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di SBI?

4) Berbagai istilah dan kosakata dari disiplin ilmu tertentu telah mewarnai corak fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu mengapa bangsa Indonesia terlalu mengagungkan bahasa asing (bahasa Inggris) dalam pembelajaran khususnya di SBI?
5) Di dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (2006:6) dipaparkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Namun, kenyataan menunjukkan bahwa di SBI telah terjadi ketidakadilan dan diskriminatif. Harkat kemanusiaan dinafikan, pendidikan telah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan dan birokrasi, proses pembelajaran di SBI telah kerasukan moralitas kapitalisme hedonistik, sehingga orientasi pendidikan pun bergeser ke arah titik kenikmatan ekonomi material.

TINDAKAN

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tindakan yang dapat dilakukan, adalah:

1) Semua pihak yang terlibat di dalam pendidikan perlu duduk bersama, baik melalui lokakarya, forum ilmiah, seminar ilmiah, untuk menyatukan pendapat dan pandangan tentang hakikat dan tujuan (visi dan misi) sekolah berstandar internasional agar tidak terjebak ke dalam percaturan politik dunia;
2) Pengambil dan pelaksana kebijakan dalam bidang pendidikan perlu memahami dan mengkaji kembali nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa sehingga kebijakan yang diambil tidak seperti menggali lubang akhirnya kita sendiri yang tercebur di dalamnya (harga, martabat, jati diri, dan identitas diri bangsa Indonesia direndahkan dan diinjak-injak oleh kita sendiri (bangsa Indonesia);
3) Pengambil dan pelaksana kebijakan dalam bidang pendidikan khususnya yang berada di SBI perlu mengetahui bahwa berbagai istilah dan kosakata dari disiplin ilmu tertentu telah mewarnai corak fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sikap bangga dan setia terhadap bahasa Indonesia tidak pudar;
4) Pengambil dan pelaksana pendidikan khususnya yang berada di SBI hendaklah mengembalikan pelaksanaan pendidikan pada hakikatnya semula, yakni mengondisikan manusia mencapai kepribadiannya, mengorientasikan pendidikan pada pembebasan/memerdekakan, berkeadilan, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak (tidak komersial) dan bersifat sosial.

III. PEMBAHASAN

Akhir-akhir ini pemerintah (Kemendiknas) sedang giat-giatnya mengalakkan dan membentuk sekolah berstandar internasional (SBI). Upaya ini bukan saja diberlakukan di tingkat pusat, tetapi juga sudah melanda ke daerah-daerah (provinsi dan kota/kabupaten) yang ada di wilayah Indonesia. Upaya ini memang tidak salah, tetapi sangat tergesa-gesa, dan berlebihan. Dikatakan tergesa-gesa karena jika dilihat dari rencana kebijakan pendidikan jangka panjang, maka SBI sebenarya masuk pada penguatan daya saing pada tingkat internasional pada periode 2020-2025 (Depdiknas 2005:i). Kebijakan ini merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan peningkatan kapasitas dan modernitas pendidikan periode 2005-2010, peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional periode 2010-2015, dan penguatan daya saing pada tingkat regional periode 2015-2020. Periodisasi perencanaan kebijakan pendidikan yang dipaparkan tersebut, menunjukkan sebenarnya sebelum bersaing secara internasional bersaing dahulu secara nasional. Itupun pelaksanaannya secara bertahap. Dengan kata lain, bangsa Indonesia perlu memersiapkan diri jauh sebelum menghadapi persaingan di tingkat internasional. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak salah langkah dalam mengambil suatu kebijakan.

Penggalakkan pembentukan sekolah berstandar internasional (SBI) dikatakan berlebihan karena bagaimana mungkin hanya demi mencapai keinginan agar setaraf dengan bangsa lain yang ada di belahan dunia yang sudah maju lebih dari seribu (1000) langkah pengambil dan pelaksana kebijakan pendidikan di Indonesia dengan tanpa merasa bersalah dan berdosa telah menggantikan eksistensi

(kedudukan dan fungsi) bahasa Indonesia sebagai milik sendiri, lambang kebanggaan, lambang identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang telah diperoleh dengan susah payah yang diiringi dengan tetesan keringat, air mata, dan darah para pejuang bangsa dalam merebut dan mempertahankan tanah tumpah darah Indonesia dengan bahasa asing (bahasa Inggris).

Sekolah berstandar internasional (SBI) pada hakikatnya bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia setaraf dengan negara-negara di dunia lainnya. Untuk maksud tersebut, seharusnya yang dijadikan berstandar internasional adalah kurikulum dan mutu lulusannya. Artinya, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum bertaraf internasional dan pula mutu lulusannya juga dapat bersaing dan dapat diterima di tingkat internasional. Mutu lulusan suatu sekolah tidak ditentukan oleh kemampuan lulusannya dalam berbahasa asing (dunia), tetapi ditentukan oleh kemampuan (kompetensi) dan keterampilan *(perfomance)* dari lulusan itu sendiri. Bila bahasa yang menjadi ukuran mutu SBI, maka sangatlah ironis jika memarjinalkan bahasa Indonesia dan menggantikannya dengan bahasa asing (bahasa Inggris), sebab bahasa Indonesia telah menjadi peringkat ke-4 bahasa dunia (bahasa Internasional) dan telah dipelajari di tiga puluh dua (32) negara (Sugono 2002). Bahkan pada seminar bahasa dan sastra di NTB 24-25 Mei 3011 Sugono mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah dipelajari di 34 negara. Ini berarti eksistensi bahasa Indonesia di mata dunia semakin terterima dan berjaya.

Sekolah berstandar Internasional (SBI) sekarang ini di samping telah memarjinalkan penggunaan bahasa Indonesia juga telah terjadi diskriminasi, baik terhadap guru maupun terhadap siswa. Guru-guru yang tidak bisa berbahasa Inggris dipinggirkan, sedangkan dari pihak siswa bukan saja karena ketidakmampuannya berbahasa Inggris, tetapi juga bagi mereka yang berekonomi lemah terdiskriminasikan karena tidak mampu membayar biaya pendidikan yang membumbung tinggi. Ini berarti hak azasinya dan hak demokrasinya telah dirampas. Hal ini tentunya bertentangan dengan (1) semboyan dan janji pemerintah dan para politisi negara bahwa biaya sekolah gratis, semua bisa sekolah, dan (2) UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (2006:6) dipaparkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".

Namun kenyataan menunjukkan pelaksanaan atau sistem pendidikan di SBI tidak lagi memerhatikan sistem demokratis, tidak lagi berkeadilan, tidak lagi menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai-nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, dan telah mendiskriminasi dan menghegemoni anak bangsa Indonesia itu sendiri. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia (pengambil dan pelaksana kebijakan) telah kerasukan moralitas kapitalisme hedonistik, sehingga orientasi pendidikan pun bergeser ke arah titik kenikmatan ekonomi material, milai-nilai budaya sudah dimarjinalkan, didistorsi, dan di*obrak-abrik* (baca Tilaar 2004; dan Rangkuti-Hasibuan 2003). Hakikat pendidikan sekarang telah menyimpang dari hakikat sebenarnya. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa hakikat pendidikan sekarang telah hancur. Kehacuran ini menurut Tilaar (2004:xiii) disebabkan oleh karena pendidikan tidak lagi memuat dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai budaya sebagai pembentuk kepribadian. Sehubungan dengan hal pendidikan dan kebudayaan, Tilaar (2004:190) mengatakan bahwa "tanpa kebudayaan tak mungkin lahir suatu kepribadian", "pendidikan tanpa kebudayaan adalah hampa (mati). Demikian juga sebaliknya kebudayaan tanpa pendidikan akan mati".

Pendangan Tilaar (2004:190) tersebut identik dengan materi bahasa Indonesia yang diintegrasikan dengan pembelajaran sastra Indonesia secara potensial memiliki area isi kehidupan sosial budaya maupun berbagai bentuk dan perubahan ideologi. Ideologi merupakan wawasan, harapan, maupun sistem kepercayaan yang secara ideal mewarnai sikap dan perilaku individu, kelompok masyarakat, maupun kesukuan dalam menjalani aktivitasnya. Di samping itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia lebih berorientasi pada kebebasan atau kemerdekaan siswa/mahasiswa untuk mengukapkan gagasannya. Dengan demikian sisitem dan bentuk tes yang dilaksanakan hendaklah sesuai dengan karaketr pembelajaran bahasa (dan sastra) Indonesia, yaitu kebebasan dan kemerdekaan berapresiasi dan berinterpretasi serta berperspektif. Kebebasan dan kemerdekaan ini belum tampak pada sistem pelaksanaan dan bentuk soal UN. Pelaksanaan soal UN menggunakan sistem tirai besi berlapis baja yang

rapuh sedangkan bentuk soal UN hanya mengukur kompetensi siswa dalam bidang kognitif dan objektif. Sehubungan dengan hal ini, Rendra (dalam Satato dan Fananie (2000) melukiskannya dalam penggalan puisinya berikut.

...

Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing
Diktat-diktat hanya boleh memberi metode
Tetapi kita sendiri musti merumuskan keadaan
Kita mesti keluar ke jalan raya
Ke laut ke desa-desa
Mencatat sendiri semua gejala
Dan menghayati persoalan yang nyata.

Puisi ini mengindikasikan, antara lain (1) bahwa pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaklah memenuhi fungsi pendidikan dan kulturalnya, (2) pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia tidak hanya bertumpuh pada salah satu teori saja, (3) fokus pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia diubah dari teks ke pembaca, (4) pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia memerdekakan dan mengisyaratkan adanya hak-hak para siswa untuk memerhitungkan latar belakang pengalaman dan pengetahuannya masing-masing dalam menyusun makna teks.

Cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi keempat harapan tersebut di atas, menurut Satato dan Fananie (2000:64) adalah (1) memberikan kebebasan pada siswa untuk memformulasikan teka-teki mereka sendiri dan bukannya menjawab pertanyaan pengajar, (2) memberikan kebebasan pada siswa untuk melakukan spekulasi dan merumuskan hipotesis, dan (3) memberikan kebebasan pada siswa untuk mencocokkan ideologi-ideologi tekstual dengan ideologi yang dimilikinya. Harapan dan cara yang dipaparkan di atas, tampaknya bertolak belakang dengan instrumen soal dan pelaksanaan ujian (UN). Soal-soal UN berbentuk objektif sehingga mengungkung kemerdekaan siswa dalam menginterpretasi dan mengekspresikan dirinya. Di samping itu, sistem proses pelaksanaan dan pengawasan UN menggunakan lapis baja atau pagar betis. Hal ini sungguh tidak beralasan dan justru sangat berpengaruh terhadap psikologi peserta ujian (UN).

Pembelajaran bahasa Indonesia selain berfungsi membekali siswa dan mahasiswa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar juga membangun sikap berbahasa sehingga bahasa Indonesia menjadi jati diri penggunannya. Artinya, bahasa Indonesia tidak sekadar alat komunikasi, melainkan memiliki muatan nilai-nilai yang menjadi barometer penggunannya (Damianti Ed 2001:iii). Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia tidak hanya karena fungsinya sebagai alat komunikasi lisan dan tulis, tetapi juga secara objektif berfungsi sebagai: (1) alat pemersatu, (2) pemberi kekhasan, (3) pembawa kewibawaan, dan (4) kerangka acuan (Alwi 2000:15; HP Ahmad dan A. Alek; Muslich 2010; Rahayu 2007; Sugono 2009; dan Widjono 2010).

Selanjutnya, berbicara tentang eksistensi (kedudukan dan fungsi) bahasa Indonesia telah ditegaskan di dalam beberapa landasan yuridis. Landasan yuridis dimaksud dipaparkan berikut. Pertama, di dalam sistem pendidikan nasional, bahasa Indonesia dijadikan garis kebijakan dalam penentuan jenis bahasa pengantar atau objek studi. Kebijakan ini berkaitan dengan (1) bagaimana peserta didik memeroleh kemahiran dalam menggunakan bahasa kebangsaannya demi tercapainya perpaduan nasional dan demi pemerataan kesempatan bekerja; (2) bagaimana orang dapat memahami etnisnya sehingga ia dapat menghayati dan melestarikan warisan budayanya; dan (3) bagaimana orang dapat memelajari jenis bahasa asing dengan bantuan komunikasi bahasa Indonesia (Alwi 2000:23).

Kedua, di dalam UURI Nomor 24 Tahun 2009 tentang "bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan". Di dalam UU RI tersebut terdapat beberapa bab, pasal dan ayat yang memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat dimaksud, antara lain dipaparkan (1) bab III bagian kesatu pasal 25 ayat 3 berbunyi "Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, dan bahasa media", (2) pada bab III bagian kedua pasal 29 ayat 1, berbunyi "Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional", (3) bab III bagian ketiga pasal 14 ayat 1 dikatakan "Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman", dan (4) bab III bagian keempat pasal 44 ayat 1 dikatakan bahwa "Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan".

Di samping itu Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang sistem pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menetapkan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam setiap tingkatan pendidikan nasional. Hal itu tercantum dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, BAB VII, Psl 33 ayat 1 yang berbunyi "Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional". Sebagai implementasi dari UU SISDIKNAS tersebut, pemerintah menetapkan kurikulum Nasional dan Garis-Garis Besar Program Pengajaran Bahasa Indonesia untuk setiap tingkatan sekolah yang ada di Indonesia. Di samping itu sejak tahun 2002 BI ditetapkan sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa di perguruan tinggi dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (Widjono Hs 2007:2).

Paparan di atas, tampaknya tidak hanya terbatas pada isapan jempol belaka. Bukti menunjukkan bahwa bahasa Indonesia di era globalisasi dan era informasi dewasa ini tetap eksis dan bahkan telah menembus dunia internasional. Dalam hal eksistensi (kedudukan dan fungsi) bahasa Indonesia, Sugono (2002) mengemukakan beberapa hal berikut. Pertama, bahasa Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia setelah bahasa Inggris, bahasa Mandarin (China), dan bahasa Prancis. Kedua, bahasa Indonesia digunakan oleh (i) lebih dari 206 juta penduduk Indonesia, (ii) lebih kurang 25 juta penduduk Melayu Malaysia, (iii) digunakan oleh bangsa Brunai Darussalam, (iv) digunakan penduduk Melayu yang tinggal di Singapura, (v) digunakan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di Filpina selatan, dan (vi) digunakan oleh sebagian masyarakat Afrika selatan. Ketiga, bahasa Indonesia digunakan, dipelajari, dan dibina oleh 32 perguruan tinggi di dunia. Bahkan pada seminar bahasa dan sastra tingkat nasional di NTB tanggal 24-25 Mei 2011 Sugono menjelaskan bahwa bahasa Indonesia telah digunakan di 34 negara. Hal ini tentunya di sisi lain menjadi kebanggaan, tetapi di sisi lain merupakan tantangan bagi kita bangsa Indonesia. Bagaimana kita sebagai pemiliknya memelihara, mengembangkan, dan memeliharanya? Mampukah kita bangsa Indonesia melakukan hal itu di tengah derasnya terpaan arus globalisasi?

Pernyataan Sugono tersebut mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia sudah saatnya dijadikan sebagai bahasa dunia. Hal itu sangat beralasan, kata Sugono, karena Indonesia terus meningkatkan SDM-nya dan mampu pula memanfaatkan SDA secara maksimal. Menurut Widada (2003) berbagai istilah dan kosakata dari disiplin ilmu tertentu telah mewarnai corak fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap konsep dan gagasan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembanganya dapat di ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan istilah dan kosakata dalam bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berada dalam percaturan dunia internasional. Hai itu tentunya merupakan sesuatu yang wajar dan alamia

Bertolak dari kandungan pasal demi pasal dan ayat demi ayat dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU RI No. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan di atas jelas menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia masih tetap dipertahankan dan tidak bisa digantikan oleh bahasa mana pun di dunia pendidikan khususnya di Indonesia, kecuali yang mengambil jurusan bahasa asing (bahasa Inggris, Arab, Jepang, atau Mandarin). Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa di sekolah berstandar internasional (SBI) tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, tetapi telah memaksakan siswa dan gurunya untuk menggunakan bahasa negara lain (bahasa Inggris). Hal ini tentunya, bukan saja mengkhianati pejuang bangsa, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak bangsa (siswa).

Berbicara tentang kepribadian atau karakter, Widjono (2007:6) mengklasifkasinya ke dalam kepribadian yang baik dan cerdas. Kepribadian yang baik didukung oleh kemampuan berbahasa yang santun,

halus, dan segala perbuatan dan tingkah lakunya dapat diterima oleh orang lain. Sedangkan kepribadian yang cerdas adalah kemampuan memanfaatkan potensi diri (pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan) untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi demi kemaslahatan orang banyak. Kepribadian yang baik diklasifikasi menjadi kepribadian kurang, kepribadian rata-rata, dan kepribadian unggul.

Kepribadian kurang berindikator (i) apatis, (ii) tidak responsif, (iii) tidak tulus, (iv) mengagumi diri sendiri, (v) mengucilkan kemampuan orang lain, (vi) mengancam, (vii) berusaha memanfaatkan orang lain, (viii) mau menang sendiri, dan (ix) tidak jujur. kepribadian rata-rata, berindikator (i) beradab, (ii) sopan, (iii) menjaga kontak mata, (iv) nada bicara yang enak, (v) ramah/reseptif, (vi) menyimak, (vii) melibatkan diri dalam percakapan, (viii) cukup membantu, (ix) jujur, (x.) dan hormat kepada orang lain. Kepribadian unggulan berindikator, antara lain (i) bersemangat terhadap gagasan baru, (ii) terlibat penuh selama berinteraksi, (iii) secara tulus tertarik pada objek kajian, (iv) bersikap serius memperhatikan objek kajian, (v) bersikap ingin mengetahui apa yang diinginkan pembacanya atau pendengarnya, (vi) berinisiatif untuk menolong orang lain dan melakukan lebih dari yang diharapkannya, (vii) bersedia membuka diri sehingga menghasilakan pertemuan antarpribadi antarpembicara/penulis dan pendengar/pembaca, (viii) memunyai rasa humor dan tidak terlalu serius tentang diri sendiri, (ix) responsif, yakni bersegera menanggapi situasi secara tepat dan menunjukkan empati yang tepat, (x.) terbuka terhadap maksud, prioritas dan keputusannya, (xi) berkeinginan tulus untuk membuat orang lain senang, memenuhi kebutuhannya dan menolong mengatasi masalahnya.

Kepribadian yang cerdas perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu (1) mengembangkan berkomunikasi ilmiah dalam berbagai media lisan maupun tulisan, (2) mengembangkan kemampuan akademis di dalam dan di luar kelas, (3) mengembangkan berbagai sikap, seperti sikap ilmiah, sikap paradigmatis dalam mengembangkan pola-pola berpikir, dan sikap cendekiawa dalam mengaktualisasikan hasil belajarnya, (4) mengembangkan kecerdasan berkelanjutan, (5) mengembangkan kepribadian terutama dalam menciptakan kreativitas baru yang terkait dengan tuntutan situasi baru yang dihadapinya serta kemampuan mengekspresikannya, (6) mengembangkan kemampuan berkomunikasi antarpribadi sehingga memantapkan perkembangan pribadinya, dan (7) mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia menghadapi pengaruh bahasa lain berarti membela lambang dan negara kesatuan RI.

Bertolak dari paparan tersebut di atas, tampaknya tidak ada jalan bagi pengambil dan pelaksana pendidikan di SBI untuk menggantikan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dengan bahasa lain dalam proses pembelajaran. Eksistensi (kedudukan dan fungsi) bahasa Indonesia sangatlah jelas dan tidak perlu diragukan oleh siapapun terutama kita bangsa Indonesia sebagai pemiliknya. Menggantikan eksistensi bahasa Indonesia berarti mengganti lambang, identitas, dan kepribadian bangsa Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Bertolak dari paparan di atas, dapat dikemukakan beberapa hal. Pertama, eksistensi (kedudukan dan fungsi) bahasa Indonesia sebagai jati diri dan identitas diri, dan lambang kepribadian bangsa Indonesia tidak bisa diganti dengan bahasa lain, sebab mengganti bahasa Indonesia berarti mengganti sebagai jati diri dan identitas diri, dan lambang kepribadian. Itulah sebabnya, meskipun di sekolah berstandar internasional sebaiknya tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kedua, eksistensi (kedudukan dan fungsi) bahasa Indonesia akan tetap eksis sampai ke tingkat dunia bergantung pada sikap, kebanggaan, dan kesetiaan bangsa Indonesia untuk menggunakannya di dalam berbagai sendi kehidupan. Ketiga, bahasa Indonesia telah mampu menciptakan dan mengadopsi istilah ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia tidak menggunakan istilah-istilah dimaksud di bumi Indonesia. Keempat, mengembalikan sistem pendidikan pada hakikatnya semula, menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan di lingkungan sekolah (SBI) guna mencapai kemerdekaan, kebebasan, hak azasinya yang berharkat dan bermartabat. Kelima, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Untuk itu, perlu dipelihara, dibina dan dikembangkan oleh

pemiliknya (bangsa Indonesia). kualitas sekolah, guru, dan siswa pada sekolah berstandar internasional (SBI) tidak dilihat dari keterampilan dan kemampuan mereka berbahasa asing (Inggris), tetapi dilihat dari dari kurikulum dan kualitas lulusannya yang dapat bersaing secara global (internasional) dengan tetap berpegang teguh pada kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Alwi, Hasan. 2000. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Anonim. 2000. *UUD 1945 dan Amandemennya*. Sukarta: pabelan

Anonim. 2006. UU RI No. 20. Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: citra umbara

Anonim. 2011. UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Kemendiknas.

Depdiknas. 2005. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005.

Muslich, Masnur. 2010. *Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara

Nurdjana, Daeang dan Sumirat, Warta. 2010. *Penuntun Perkuliahan Bahasa Indonesia Untuk Memandu Acara MC-Moderator, Karya Tulis Akademik, dan Surat Menyurat*. Bandung: Alfabeta

Rahayu, Minto. 2007. *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*. Jakarta: PT Grasindo

Rangkuti dan Hasibuan Sofia. 2002. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia: Teori dan Konsep*. Jakarta: Dian Rakyat

Satoto, Soediro dan Fananie Zainuddin. 2000. *Sastra: Idiologi, Politik, dan Kekuasaan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Sugono, Dendy. 2002. *Bahasa Indonesia Urutan Keempat di Dunia*. (online) (http://www.icmi.or.id/berita-091002.htm, diakses 26 februari 2005).

Sugono, Dendy. 2009. *Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Suyanto. 2002. *Tantangan Global Pendidikan Nasional*. Makalah disampaikan pada 70 tahun prof. Dr. H.a.r Tilaar, M.sc.ed, tanggal...2002.

Syafi'ie, Imam 2003. *Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Prespektif Globalisasi dan Otonomi Derah*. Makalah disampaikan pada pertemuan ilmiah bahasa dan sastra indonesia XXV perguruan tinggi swasta se-indonesia di yogyakarta, tanggal 6-7 oktober 2003.

Tilaar, H.A.R. 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Widada, Hs. 2003. *Reaktulitas Peran Bahasa Indonesia dalam Konteks Lokal dan Global*. Makalah disampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia VII, Jakarta, tanggal 14-17 Oktober 2003.

Widjono, HS. *2010. Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo

Wurianto, Arif Budi. 2002. *Globalisasi, Teknologi Informasi, dalam Peran Bahasa*. Linguistik Indonesia

BIODATA PENULIS

(a) Nama lengkap dan gelar	:	Dr. Fatmah AR. Umar, M.Pd
(b) Tempat/Tgl lahir	:	Gorontalo, 4 Januari 1960
(c) Jenis Kelamin	:	Perempuan
(d) Pangkat, Golongan,	:	Pembina Utama Muda, IVc
(e) dan NIP	:	19600104. 198803. 2.002
(f) Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala

(g) Jabatan Struktural : Tidak ada
(h) Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
(i) Fakultas : Fakultas Sastra dan Budaya
(j) Universitas : Universitas Negeri Gorontalo
(k) Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Wumialo Kec. Kota Tenga (Blkg RRI) Gorontalo
Email : fatmahumar@yahoo.com.
: fatmah.umarung@.ac.id
: faruh60@gmail.com
Telepon:
Rumah : (0435) 825240
Kantor : (0435) 821125-821752
HP : 081340006270